Da'wah and Islamic Management Journal
Vol. 2 No. 1 (2025) : 13-24
Journal homepage https://ejournal.stidkiarrahmah.ac.id/index.php/Daiman

Pengaruh Program Pinjaman Modal Usaha Berbasis Masjid Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Jemaah

***Khoirum Nasyamah[1], Raihan Luqman Hakim[2], Diki Taufikkurrohman[3]**
[1]Universitas Muhammadiyah Semarang, Indonesia
[2]Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Silam Ar Rahmah Surabaya, Indonesia
[3]UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
*Email: khoirunnasyamah@gmail.com

DOI: doi.org/10.52833/daiman.v2i1.320

Received: 12 November 2024	Accepted: 10 Januari 2025	Published: 2 Februari 2025

Abstract:

This study examines the association between the accessibility and implementation quality of a mosque-based business loan program and congregants' perceived economic welfare at Jogokariyan Mosque, Yogyakarta. The study uses questionnaire data from 31 of 66 recorded program recipients, collected through a non-probability approach and analyzed using partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM). The measurement model comprises six indicators of loan-program access and implementation and three retained indicators of welfare. The reported results show acceptable internal consistency (Cronbach's alpha = 0.879 and 0.842; composite reliability = 0.906 and 0.900) and average variance extracted values of 0.620 and 0.750. The structural association is positive ($\beta = 0.786$; $t = 7.265$; $p < 0.001$; $R^2 = 0.617$). Furthermore, 28 respondents (90.3%) reported using loans for business activities. These findings support an association between respondents' perceptions of loan-program quality and welfare, but do not establish a causal impact or directly demonstrate sustained economic empowerment. The mosque's collaboration with external partners indicates a potential role as a community intermediary. Incomplete sampling documentation, discrepancies in one reported indicator loading, unavailable HTMT results, and the cross-sectional single-site design require cautious interpretation.

Keywords: *Mosque-Based Financing; Loan-Program Quality; Economic Welfare; Community Intermediary; PLS-SEM*

Abstrak:

Penelitian ini menguji hubungan kualitas akses dan pelaksanaan program pinjaman modal usaha berbasis masjid dengan kesejahteraan ekonomi yang dipersepsikan jemaah di Masjid Jogokariyan Yogyakarta. Data kuesioner diperoleh dari 31 di antara 66 penerima program yang tercatat melalui pendekatan nonprobabilitas dan dianalisis menggunakan partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM). Model pengukuran yang dilaporkan memuat enam indikator program pembiayaan serta tiga indikator kesejahteraan yang dipertahankan. Nilai Cronbach's alpha kedua konstruk adalah 0,879 dan 0,842; composite reliability 0,906 dan 0,900; serta average variance extracted (AVE) 0,620 dan 0,750. Hubungan antarkonstruk bernilai positif dan signifikan secara statistik ($\beta = 0{,}786$; $t = 7{,}265$; $p < 0{,}001$; $R^2 = 0{,}617$). Sebanyak 28 responden (90,3%) menggunakan pinjaman untuk kegiatan usaha. Hasil ini mendukung adanya keterkaitan antara persepsi terhadap kualitas program dan kesejahteraan, tetapi tidak membuktikan hubungan kausal ataupun keberhasilan pemberdayaan ekonomi berkelanjutan. Kolaborasi masjid dengan mitra eksternal menunjukkan potensi peran masjid sebagai perantara sumber daya komunitas. Interpretasi temuan dibatasi oleh dokumentasi penarikan sampel yang belum lengkap,

perbedaan satu angka loading antar tabel sumber, ketiadaan HTMT, serta desain potong lintang pada satu lokasi.

Kata Kunci: *Pembiayaan Berbasis Masjid; Kualitas Program Pinjaman; Kesejahteraan Ekonomi; Perantara Komunitas; PLS-SEM*

PENDAHULUAN

Masjid berpotensi mengembangkan fungsi sosial-ekonominya selain menjalankan pelayanan ibadah. Dalam perspektif manajemen dakwah, program ekonomi dapat menjadi bagian dari pelayanan sosial-keagamaan ketika diselenggarakan untuk menjawab kebutuhan jemaah dan memperkuat kemampuan mereka mengelola penghidupan (Alwi, 2016; Aziz & Ali, 2005). Akan tetapi, keberadaan bantuan modal tidak identik dengan pemberdayaan. Pembiayaan terutama berkaitan dengan tersedianya dana dan mutu mekanisme penyalurannya, sedangkan pemberdayaan menuntut perubahan kapasitas, kendali terhadap sumber daya, dan kemandirian penerima secara lebih berkelanjutan (Sumodiningrat, 2007). Pembedaan tersebut penting agar evaluasi program masjid tidak berhenti pada jumlah penerima atau besarnya pembiayaan.

Masjid Jogokariyan Yogyakarta menyelenggarakan program pinjaman modal usaha sejak 2019. Berdasarkan dokumentasi penelitian, jumlah penerimanya berkembang dari sekitar 16 menjadi 66 orang; nilai bantuan yang dideskripsikan mencapai maksimal sekitar Rp3 juta untuk pembiayaan kebutuhan usaha, antara lain gerobak dan freezer. Program juga memperoleh dukungan BSI dan OKE OCE. Selain itu, masjid menyelenggarakan pasar rakyat pada Jumat hingga Ahad. Rangkaian kegiatan ini menggambarkan kapasitas masjid menghubungkan kebutuhan ekonomi jemaah dengan sumber daya kelembagaan. Namun, keberadaan pasar, dukungan mitra, dan penyaluran pembiayaan belum dengan sendirinya membuktikan bahwa setiap penerima mengalami peningkatan penjualan, kemandirian usaha, atau keberhasilan pengembalian pinjaman.

Literatur mikrofinansial menjelaskan bahwa berkurangnya hambatan akses kredit dapat membuka peluang penggunaan modal secara produktif (Yunus, 2007; Wang et al., 2020). Prasetyo et al. (2023) dan Yanti (2022) melaporkan kaitan pembiayaan dengan pendapatan UMKM, sedangkan kajian lain menunjukkan bahwa hasil intervensi ekonomi bergantung pula pada kemampuan penerima, lingkungan usaha, dan tata kelola kelembagaan (Sethy & Jana, 2021; Hörner & Wollni, 2021). Oleh karena itu, studi program masjid memerlukan pembedaan antara akses dan pelaksanaan pembiayaan sebagai karakter program, kesejahteraan sebagai keadaan penerima, serta pemberdayaan sebagai proses perubahan kemampuan yang membutuhkan pembuktian tersendiri. Kesenjangan kajian ini terletak pada terbatasnya pengujian kuantitatif yang secara eksplisit menelaah kualitas program pembiayaan yang dimediasi masjid dan keterkaitannya dengan kesejahteraan penerima.

Secara konseptual, istilah ‘pinjaman modal usaha’ dalam penelitian terdahulu ini digunakan sebagai nama program yang diteliti, bukan ukuran nominal dana yang dipinjam. Butir kuesionernya lebih tepat memotret persepsi tentang kesesuaian pembiayaan dengan kebutuhan, kemudahan persyaratan

dan prosedur, ketepatan pelaksanaan, kecepatan pencairan, serta peluang akses. Karena itu, konstruk independen dibaca ulang secara terbatas sebagai kualitas akses dan pelaksanaan program pinjaman modal usaha. Sementara itu, kesejahteraan ditafsirkan sebagai kesejahteraan yang dilaporkan oleh responden, bukan perubahan pendapatan objektif yang diverifikasi melalui pencatatan keuangan. Pembedaan konsep ini mencegah koefisien statistik ditafsirkan sebagai efek besaran pinjaman atau bukti langsung keberhasilan pemberdayaan.

Penelitian bertujuan menilai hubungan kualitas akses dan pelaksanaan pinjaman modal berbasis Masjid Jogokariyan dengan kesejahteraan ekonomi jemaah penerima program, serta mendiskusikan implikasi temuan bagi tata kelola manajemen dakwah. Analisis memakai PLS-SEM karena kedua variabel dimodelkan sebagai konstruk laten yang direpresentasikan beberapa indikator, sehingga evaluasi pengukuran dapat disajikan bersama hubungan struktural. Pemilihan ini tidak didasarkan semata pada jumlah responden yang kecil ataupun anggapan bahwa PLS-SEM selalu lebih unggul daripada regresi. Berbeda dengan regresi yang dapat diterapkan pada skor komposit teramati, pendekatan yang digunakan di sini perlu terlebih dahulu memperlihatkan kelayakan indikator, konsistensi internal, serta pemisahan antarkonstruk sebelum koefisien jalur ditafsirkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif potong lintang pada penerima program pinjaman modal usaha Masjid Jogokariyan, Yogyakarta. Berdasarkan daftar program, terdapat 66 penerima; sebanyak 31 orang (47,0% dari populasi tercatat) mengisi kuesioner melalui Google Form dan menjadi sampel analisis. Skripsi sumber menyebut teknik purposive sampling dengan kriteria jemaah masjid yang sekurang-kurangnya satu kali menerima program. Akan tetapi, kriteria tersebut pada dasarnya sama dengan karakter populasi dan tidak menjelaskan pemilihan 31 responden secara khusus. Oleh karena itu, pengambilan sampel dilaporkan lebih hati-hati sebagai sampel nonprobabilitas dari penerima yang berhasil dijangkau dan berpartisipasi; mekanisme undangan, alasan tidak berpartisipasinya 35 penerima, dan karakter nonresponden tidak terdokumentasi. Temuan tidak dapat digeneralisasi secara statistik kepada seluruh penerima program.

Data utama berasal dari kuesioner persepsi dengan skala Likert lima tingkat; keterangan program diperoleh dari dokumentasi serta wawancara pengelola, termasuk Ketua Baitul Maal dan Ketua Biro Ekonomi masjid sebagaimana dicantumkan dalam skripsi sumber. Instrumen awal memuat butir mengenai kesesuaian besaran pinjaman, kemudahan persyaratan, prosedur, pelaksanaan, pencairan, kesesuaian kebutuhan, dan akses program. Dengan demikian, variabel X diperlakukan sebagai persepsi kualitas akses dan pelaksanaan pembiayaan, bukan nominal pinjaman. Variabel Y berasal dari butir tentang kondisi kesejahteraan yang dipersepsikan responden. Walaupun landasan teori skripsi membahas aspek material, fisik, mental, dan spiritual, keluaran model pengukuran yang terdokumentasi hanya menampilkan enam

indikator X (X1–X6) dan tiga indikator Y (AM, AP, AS). Korespondensi seluruh butir awal dengan indikator akhir tidak dijelaskan dalam dokumen sumber sehingga tidak direkonstruksi secara spekulatif.

Analisis memakai PLS-SEM dengan perangkat lunak SmartPLS, mengikuti dua tahap evaluasi: model pengukuran reflektif dan model struktural (Ghozali & Latan, 2015). Tahap pertama melaporkan outer loading setiap indikator, average variance extracted (AVE), Cronbach's alpha, composite reliability, dan cross loading. Outer loading sekitar 0,60 atau lebih dibaca sebagai dukungan awal validitas konvergen pada penelitian eksploratoris; AVE di atas 0,50 serta reliabilitas komposit di atas 0,70 digunakan sebagai rujukan evaluasi. Validitas diskriminan dikaji berdasarkan dominasi cross loading indikator pada konstruknya sendiri. Nilai heterotrait-monotrait ratio (HTMT) tidak tercantum pada hasil SmartPLS yang tersedia dalam skripsi dan karenanya tidak dilaporkan atau direka. Keluaran sumber juga memiliki satu perbedaan angka loading yang dinyatakan secara eksplisit pada penyajian hasil.

Pada tahap struktural, koefisien jalur dan signifikansinya ditinjau dari hasil bootstrapping yang tercatat, dengan t-statistic dan p-value serta koefisien determinasi (R^2). Hasil dilaporkan sebagai asosiasi dalam model, bukan estimasi dampak kausal. Penelitian ini tidak memakai kelompok kontrol, pengamatan longitudinal, maupun kontrol statistik terhadap karakteristik awal usaha, pendapatan, atau faktor luar lainnya. Analisis atas perubahan distribusi pendapatan sebelum dan setelah menerima pinjaman hanya bersifat deskriptif karena berasal dari laporan responden dan belum memenuhi persyaratan uji perubahan berpasangan dengan kategori yang seragam. Dengan demikian, temuan statistik dan uraian program dibaca menurut kekuatan bukti masing-masing.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden dan Evaluasi Model Pengukuran

Dari 31 responden, sebanyak 23 orang (74%) adalah perempuan dan delapan orang (26%) laki-laki; kelompok pekerjaan pedagang, pebisnis, dan pegawai swasta mencakup 27 responden (87%). Sebanyak 28 responden (90,3%) melaporkan menggunakan pinjaman untuk modal usaha, sedangkan tiga responden (9,7%) menyebut kebutuhan pendidikan. Informasi ini memperlihatkan dominasi orientasi usaha pada sampel, sekaligus menunjukkan bahwa penggunaan dana tidak sepenuhnya seragam. Keterangan tersebut merupakan distribusi jawaban responden, bukan audit pemanfaatan pinjaman atau pengukuran keberhasilan usaha secara objektif.

Evaluasi model pengukuran yang terdapat dalam skripsi sumber memuat enam indikator pada konstruk program pembiayaan (X1–X6) dan tiga indikator kesejahteraan (AM, AP, AS). Sebagian besar nilai outer loading berada di atas 0,70, sementara X3 memiliki nilai 0,603. Nilai ini masih melampaui batas 0,60 yang digunakan dalam analisis asal, tetapi perlu ditafsirkan secara hati-hati. Tabel 1 memindahkan angka loading yang benar-benar tercantum pada skripsi tanpa menciptakan hasil pengolahan baru. Terdapat ketidaksamaan untuk indikator AM: tabel loading mencatat 0,850, sedangkan tabel cross loading

mencatat 0,886. Oleh karena itu, angka AM belum dapat dinyatakan telah terverifikasi sepenuhnya tanpa pemeriksaan ulang ekspor SmartPLS asli.

Tabel 1. Outer Loading Indikator Konstruk

Konstruk	Indikator	Outer loading
Kualitas program pinjaman	X1	0,850
Kualitas program pinjaman	X2	0,718
Kualitas program pinjaman	X3	0,603
Kualitas program pinjaman	X4	0,770
Kualitas program pinjaman	X5	0,899
Kualitas program pinjaman	X6	0,849
Kesejahteraan ekonomi	AM*	0,850
Kesejahteraan ekonomi	AP	0,860
Kesejahteraan ekonomi	AS	0,852

Sebagai pemeriksaan validitas diskriminan, Tabel 2 menampilkan cross loading masing-masing indikator. Pada seluruh baris, loading indikator pada konstruk yang dimaksud lebih tinggi daripada pada konstruk lainnya. Meskipun demikian, selisih nilai AM (0,886 berbanding 0,869) dan X5 (0,899 berbanding 0,820) relatif kecil, sehingga pemisahan kedua konstruk tidak semestinya dinyatakan terbukti secara meyakinkan hanya berdasarkan pemeriksaan ini. Dengan dua konstruk yang berkorelasi kuat, konfirmasi HTMT dari data atau keluaran SmartPLS asli akan lebih memadai sebelum artikel dipublikasikan.

Tabel 2. Cross Loading untuk Pemeriksaan Validitas Diskriminan

Indikator	Kesejahteraan ekonomi	Kualitas program pinjaman
AM*	0,886	0,869
AP	0,860	0,516
AS	0,852	0,544
X1	0,602	0,850
X2	0,454	0,718
X3	0,345	0,603
X4	0,534	0,770
X5	0,820	0,899
X6	0,768	0,849

Tabel 3 memperlihatkan AVE sebesar 0,620 untuk program pembiayaan dan 0,750 untuk kesejahteraan ekonomi. Cronbach's alpha masing-masing sebesar 0,879 dan 0,842, sedangkan composite reliability sebesar 0,906 dan 0,900. Angka tersebut mendukung konsistensi internal dan validitas konvergen berdasarkan ambang yang digunakan pada penelitian asal. Akan tetapi, nilai AVE dan reliabilitas tidak dengan sendirinya menyelesaikan persoalan validitas diskriminan maupun ketidakselarasan satu angka AM. Karena data mentah dan keluaran lengkap SmartPLS tidak dilampirkan pada sumber yang tersedia, pengujian ulang model, termasuk HTMT, tidak dilakukan dalam revisi artikel ini.

Tabel 3. AVE dan Reliabilitas Konstruk

Konstruk	AVE	Cronbach's alpha	Composite reliability
Kualitas program pinjaman	0,620	0,879	0,906
Kesejahteraan ekonomi	0,750	0,842	0,900

Pengujian model struktural pada Tabel 4 menunjukkan koefisien jalur positif sebesar 0,786, t-statistic 7,265, dan nilai p yang dibulatkan menjadi 0,000 pada laporan asal (dituliskan sebagai $p < 0,001$). Nilai R^2 sebesar 0,617 menunjukkan bahwa dalam model yang diuji, konstruk kualitas akses dan pelaksanaan program pembiayaan berkaitan dengan 61,7% variasi skor kesejahteraan ekonomi responden. Angka tersebut bukan persentase penerima yang berhasil keluar dari kemiskinan, bukan tingkat keberhasilan program, dan tidak menunjukkan bahwa kenaikan satu unit pinjaman pasti meningkatkan kesejahteraan sebesar 78,6%. Interpretasi harus tetap mempertimbangkan kelayakan pengukuran serta karakter data potong lintang.

Tabel 4. Hasil Pengujian Jalur Struktural

Jalur	β	t-statistic	p-value	R^2
Kualitas program pinjaman → kesejahteraan ekonomi	0,786	7,265	< 0,001	0,617

Informasi deskriptif pada skripsi menunjukkan perubahan komposisi kategori pendapatan usaha yang dilaporkan responden. Sebelum menerima pinjaman, 48% responden berada pada kategori Rp1–2 juta per bulan dan 23% di bawah Rp1 juta; setelah menerima pinjaman, kategori Rp2–3 juta mencakup 32%, sedangkan 23% berada di atas Rp4 juta. Distribusi tersebut memberi konteks tambahan bagi laporan tentang penggunaan dana produktif. Namun, rentang kategori sebelum dan sesudah tidak sepenuhnya sama, dan tidak tersedia data berpasangan yang memungkinkan penghitungan besaran perubahan tiap individu secara andal. Karena itu, temuan ini tidak diperlakukan sebagai estimasi kausal peningkatan pendapatan akibat program.

Hasil penelitian lebih tepat dibaca sebagai hubungan antara pengalaman penerima atas mutu layanan pembiayaan dan kesejahteraan yang mereka persepsikan. Interpretasi demikian selaras dengan literatur yang mengingatkan bahwa manfaat akses modal dipengaruhi kondisi awal penerima, kemampuan mengelola usaha, dan konteks ekonomi lokal (Hörner & Wollni, 2021; Santika et al., 2019). Dengan sampel nonprobabilitas dan hanya satu lokasi, korelasi yang kuat tidak menghapus kemungkinan bias persepsi bersama, seleksi responden, ataupun faktor luar yang tidak dimasukkan ke model.

Dengan demikian, hasil PLS-SEM mendukung hipotesis asosiasi positif dalam sampel, tetapi tidak cukup untuk menyimpulkan pemberian pinjaman sebagai penyebab tunggal peningkatan kesejahteraan. Peran utama model adalah memberi bukti awal bahwa pengalaman terhadap akses dan pelaksanaan pembiayaan relevan dalam evaluasi kesejahteraan penerima. Nilai substantif temuan bagi manajemen masjid terletak pada kebutuhan mengukur kualitas proses pembiayaan bersama kondisi penerima, alih-alih menilai keberhasilan hanya dari jumlah penyaluran dana.

Akses Pembiayaan dan Pemanfaatan Modal untuk Aktivitas Produktif

Program pinjaman modal Masjid Jogokariyan memberikan contoh upaya pengurangan kendala akses pembiayaan pada tingkat komunitas. Dokumentasi penelitian menyebut pinjaman dengan nilai maksimal sekitar Rp3 juta dan contoh pemanfaatan untuk gerobak serta freezer. Uraian ini menunjukkan karakter dukungan yang dapat digunakan untuk memperoleh aset produktif, tetapi belum membuktikan bahwa setiap penerima membeli aset tersebut atau bahwa perolehan aset menghasilkan kenaikan keuntungan yang terukur. Secara konseptual, akses pembiayaan dapat memperluas kesempatan usaha bagi kelompok dengan keterbatasan sumber daya (Wang et al., 2020).

Sebanyak 28 dari 31 responden menyatakan menggunakan pinjaman bagi kegiatan usaha. Proporsi ini menjelaskan orientasi pemanfaatan dana dalam sampel, bukan ukuran langsung peningkatan kapasitas produksi atau ketahanan usaha. Mikrofinansial dapat mendukung aktivitas produktif ketika modal benar-benar digunakan sesuai kebutuhan dan disertai kemampuan manajerial yang memadai (Sethy & Jana, 2021). Oleh sebab itu, tahap antara menerima pinjaman dan tercapainya kesejahteraan perlu diuji lebih lanjut melalui indikator yang belum tersedia dalam penelitian ini, seperti perubahan omzet, laba, aset usaha, literasi keuangan, serta kesinambungan usaha.

Kualitas akses pembiayaan juga relevan bagi mereka yang menghadapi persyaratan kredit formal. Wang et al. (2020) menunjukkan bahwa keterbatasan aset dan agunan dapat membatasi kesempatan memperoleh kredit. Dalam konteks masjid, pengelolaan yang dekat dengan jemaah berpotensi membantu penilaian kebutuhan melalui pengetahuan sosial lokal. Akan tetapi, penelitian ini tidak membandingkan tingkat penolakan kredit formal maupun biaya transaksi antarlembaga. Karena itu, keunggulan masjid atas lembaga pembiayaan lain masih merupakan penjelasan teoretis yang membutuhkan pengujian.

Penelitian Adams et al. (2021) dan Okyere dan Ahene-Codjoe (2022) mengilustrasikan bahwa dukungan sumber daya produktif dapat berhubungan dengan penggunaan teknologi dan kesejahteraan pada konteks berbeda. Temuan tersebut membantu menyusun mekanisme yang mungkin: akses terhadap modal memungkinkan aktivitas usaha, aktivitas usaha dapat meningkatkan pendapatan, dan pendapatan berpotensi memperbaiki kondisi rumah tangga. Namun, rantai mekanisme tersebut tidak diukur sebagai variabel mediasi dalam model Masjid Jogokariyan sehingga tidak dapat dinyatakan telah terkonfirmasi oleh koefisien jalur penelitian ini.

Sebagai institusi berbasis komunitas, masjid juga memiliki peluang mengembangkan praktik pembiayaan yang mempertimbangkan keadaan penerima, bukan hanya transaksi penyaluran dana. Literatur tentang microcredit as an alternative economic space menekankan pentingnya praktik pembiayaan yang bertanggung jawab terhadap kelompok kurang terlayani (McHugh et al., 2019). Dalam studi ini, penilaian jemaah atas persyaratan, prosedur, dan pencairan relevan sebagai sisi pelayanan program, namun belum mencakup seluruh dimensi pembiayaan bertanggung jawab seperti beban cicilan,

kemacetan pembayaran, dan perlindungan peminjam.

Pola kategori pendapatan usaha yang dilaporkan sesudah memperoleh pinjaman tampak lebih tinggi daripada sebelum memperoleh pinjaman pada sebagian responden. Akan tetapi, survei satu kali tidak menyediakan pembandingan yang setara terhadap pendapatan tanpa intervensi. Klaim bahwa dana pinjaman menaikkan pendapatan secara langsung akan melampaui desain penelitian. Bukti deskriptif tersebut lebih tepat dijadikan indikasi awal untuk menyusun evaluasi berulang dengan ukuran pendapatan yang konsisten dan dokumentasi transaksi usaha.

Secara keseluruhan, temuan mengenai penggunaan pinjaman dan persepsi terhadap pelaksanaannya memperlihatkan potensi program sebagai sarana perluasan akses ekonomi, bukan bukti final peningkatan kapasitas usaha. Kesimpulan yang lebih dapat dipertanggungjawabkan adalah perlunya mempertemukan pendanaan dengan dukungan pemanfaatan produktif, monitoring usaha, dan pengukuran kesejahteraan yang dapat diuji dari waktu ke waktu. Pembiayaan merupakan titik masuk bagi pemberdayaan, tetapi bukan sinonim dari pemberdayaan itu sendiri.

Dari Pembiayaan Menuju Pemberdayaan: Masjid sebagai Perantara Komunitas

Pembedaan antara pembiayaan dan pemberdayaan menentukan kedalaman kontribusi penelitian ini. Pembiayaan pada program Masjid Jogokariyan dapat diidentifikasi melalui mekanisme peminjaman, sedangkan pemberdayaan mensyaratkan berkembangnya keterampilan usaha, kendali atas sumber daya, kemandirian pengambilan keputusan, dan keberlanjutan penghidupan (Sumodiningrat, 2007). Penelitian yang dianalisis baru mengukur pengalaman pembiayaan dan kesejahteraan yang dilaporkan penerima. Dengan demikian, sebutan ‘model pemberdayaan’ perlu diposisikan sebagai arah pengembangan kelembagaan yang mungkin, belum sebagai capaian empiris yang telah dibuktikan oleh hasil statistik.

Secara kelembagaan, Masjid Jogokariyan menjalankan program pembiayaan dan memiliki hubungan dengan BSI serta OKE OCE. Fakta adanya mitra tersebut membuka pembacaan yang lebih spesifik mengenai masjid sebagai community intermediary, yaitu institusi yang menghubungkan kebutuhan jemaah dengan sumber daya dan jejaring pendukung dari luar komunitas masjid. Kontribusi ini berbeda dari model lembaga yang semata-mata menyediakan modal dari sumber internal. Penelitian tentang optimalisasi fungsi ekonomi masjid (Alwi, 2016) dan pengembangan lembaga ekonomi berbasis masjid (Nurul, 2022) menyediakan pembanding konseptual. Walaupun demikian, bentuk pembagian tugas, aliran dana, dan intensitas pendampingan para mitra belum dijelaskan secara terukur oleh data penelitian.

Sebagai perantara komunitas, masjid berpotensi menjalankan fungsi identifikasi kebutuhan, fasilitasi akses, penyambungan jejaring, dan pemantauan penerima. Fungsi ini tidak dapat disamakan secara otomatis dengan peningkatan kemampuan wirausaha. Perspektif investasi sosial menekankan bahwa pemberian sumber daya menjadi lebih bermakna ketika meningkatkan kemampuan penerima berpartisipasi dalam aktivitas produktif (Mahon, 2019;

Heitzmann & Matzinger, 2021). Dalam kasus Jogokariyan, indikator kemampuan usaha, kontrol ekonomi, dan kemandirian penerima masih perlu dikembangkan sebagai variabel evaluasi tersendiri.

Keberadaan pasar rakyat yang diselenggarakan pada Jumat, Sabtu, dan Ahad merupakan karakter lingkungan program yang berpotensi menyediakan ruang pemasaran. Namun, dokumen penelitian belum mencatat apakah penerima pinjaman benar-benar berjualan di pasar tersebut, berapa frekuensi partisipasinya, atau apakah penjualan mereka meningkat karenanya. Karena itu, pasar rakyat tidak digunakan sebagai bukti keberhasilan pemasaran ataupun outcome program. Secara teoretis, penghubungan modal dan ruang transaksi lokal dapat menjadi salah satu mekanisme penguatan aset komunitas (Murtagh & Boland, 2019), tetapi mekanisme ini masih berupa hipotesis yang memerlukan verifikasi empiris.

Dari sudut manajemen dakwah, fungsi ekonomi masjid bernilai dakwah apabila dijalankan sebagai aktualisasi tanggung jawab sosial-keagamaan, pelayanan yang bermartabat, dan pembinaan kemandirian jemaah, bukan semata karena pelaksananya adalah lembaga masjid. Masyhur (2022) menunjukkan keterkaitan program ekonomi dengan strategi dakwah dalam konteks kelembagaan sosial Islam. Pada Masjid Jogokariyan, orientasi membantu jemaah melalui pembiayaan dapat dipahami sebagai ekspresi dakwah bil-hal secara konseptual. Namun, internalisasi nilai keagamaan, pengalaman pembinaan, dan perubahan kapasitas spiritual penerima tidak diteliti secara khusus, sehingga kontribusi dakwah tidak dinyatakan sebagai dampak yang telah terukur.

Kajian Rohimat (2020) menunjukkan potensi sinergi antara pengelola masjid dan aktor pendukung dalam merespons kebutuhan sosial pada masa pandemi. Kesamaan yang relevan dengan Jogokariyan adalah peluang koordinasi berbagai sumber daya, bukan kesamaan otomatis tingkat keberhasilan. Data yang tersedia hanya menunjukkan keberadaan dukungan BSI dan OKE OCE serta berkembangnya jumlah penerima program. Untuk menilai mutu kolaborasi, penelitian lanjutan perlu mengidentifikasi fungsi masing-masing mitra, mekanisme akuntabilitas, alokasi risiko, serta kontribusi aktual terhadap penerima.

Dimensi keberlanjutan tidak dapat dilepaskan dari pengembalian dana pinjaman. Literatur mengenai lembaga kredit menempatkan loan recovery sebagai komponen penting keberlangsungan sumber dana yang dapat digulirkan kembali (Panda et al., 2023). Sayangnya, penelitian ini tidak menyajikan tingkat pengembalian pinjaman aktual, jumlah tunggakan, ataupun rasio pembiayaan bermasalah program Masjid Jogokariyan. Karena itu, pernyataan mengenai keberhasilan dana bergulir atau ketahanan finansial program belum dapat dibuat. Indikator tersebut direkomendasikan sebagai agenda audit dan evaluasi pengelola, bukan diperlakukan sebagai hasil penelitian.

Dengan batas bukti tersebut, kontribusi konseptual artikel ini terletak pada pembacaan Masjid Jogokariyan sebagai penghubung potensial antara

kebutuhan pembiayaan jemaah, dukungan lembaga eksternal, dan kesempatan aktivitas ekonomi komunitas. Model pemberdayaan yang utuh masih memerlukan pembuktian keterkaitan antara akses pembiayaan, penguatan kapasitas, penggunaan pasar, keberhasilan pembayaran kembali, dan perbaikan kesejahteraan. Penelitian ini menyediakan bukti awal pada sisi persepsi kualitas program dan kesejahteraan, bukan verifikasi empiris terhadap seluruh tahapan model tersebut.

Implikasi Tata Kelola Program bagi Manajemen Masjid

Hasil hubungan statistik yang positif mengarahkan perhatian pengelola pada mutu pengalaman penerima ketika mengakses program pembiayaan. Indikator kesesuaian jumlah, persyaratan, prosedur, pencairan, dan akses menjadi aspek layanan yang layak dipantau secara rutin. Akan tetapi, perbaikan aspek tersebut tidak boleh langsung disamakan dengan kenaikan kesejahteraan secara kausal. Evaluasi program perlu menempatkan kualitas layanan sebagai proses dan perkembangan kondisi ekonomi penerima sebagai hasil yang diukur terpisah.

Implikasi pertama ialah membangun basis data penerima yang mencatat profil usaha, kebutuhan modal, besaran dan jadwal pinjaman, tujuan penggunaan, serta kondisi ekonomi awal. Pengukuran berkala dengan indikator pendapatan, laba, aset, dan keberlangsungan usaha yang sama akan membantu membedakan perkembangan aktual dari sekadar persepsi setelah menerima bantuan. Rekapitulasi administrasi juga sebaiknya memungkinkan penelusuran responden yang tidak dapat atau tidak bersedia mengikuti evaluasi, sehingga potensi bias partisipasi dapat dijelaskan.

Implikasi kedua adalah merancang pendampingan usaha sebagai komponen program yang terdokumentasi, bukan menganggapnya telah berlangsung hanya berdasarkan keberadaan pinjaman. Keterampilan pencatatan keuangan, penentuan harga, pemasaran, dan pengelolaan persediaan merupakan contoh agenda yang dapat dipertimbangkan. Rekomendasi ini sejalan dengan penelitian mengenai peran dukungan usaha dalam pemanfaatan modal produktif (Prasetyo et al., 2023; Adams et al., 2021). Efektivitas pendampingan perlu dievaluasi dengan tingkat kehadiran, perubahan keterampilan, serta keluaran usaha yang dapat diperiksa.

Implikasi ketiga mencakup pemantauan kedisiplinan pengembalian pinjaman dan keberlanjutan dana bergulir. Pengurus sebaiknya mendokumentasikan jumlah pinjaman jatuh tempo, pembayaran tepat waktu, keterlambatan, restrukturisasi, dan saldo dana yang dapat disalurkan kembali. Panda et al. (2023) mengingatkan pentingnya pengelolaan pengembalian bagi kelangsungan kelembagaan pembiayaan. Karena tidak tersedia data aktual loan recovery Jogokariyan, indikator-indikator ini merupakan usulan sistem evaluasi, bukan laporan atas capaian program yang sudah berlangsung.

Implikasi berikutnya adalah memperjelas seleksi dan layanan penerima. Masjid dapat menilai kesesuaian tujuan peminjaman, kesiapan penggunaan produktif, dan kemampuan pengembalian tanpa menutup akses bagi kelompok yang rentan. Transparansi kriteria, alur persetujuan, dan penyampaian hak serta kewajiban peminjam akan membantu memastikan bahwa kedekatan sosial tidak

berubah menjadi ketidakjelasan prosedur. Pada sisi penelitian, pencatatan alasan pengajuan yang diterima maupun ditolak juga penting untuk menilai ketepatan sasaran program.

Kolaborasi dengan BSI dan OKE OCE patut diperjelas melalui pembagian peran yang dapat dievaluasi: sumber pendanaan, konsultasi teknis, pelatihan, pelaporan, dan pemantauan hasil. Posisi masjid sebagai community intermediary akan lebih dapat dibuktikan apabila interaksi para aktor dan manfaat spesifiknya terdokumentasi. Di luar itu, pasar rakyat dapat diposisikan sebagai fasilitas program; untuk menguji manfaat pemasaran, pengelola perlu mencatat jumlah penerima pinjaman yang memanfaatkannya, frekuensi keikutsertaan, dan perkembangan transaksi.

Orientasi dakwah juga perlu diterjemahkan ke dalam ukuran program yang relevan, misalnya pelayanan yang adil, perlindungan martabat penerima, penguatan tanggung jawab ekonomi keluarga, dan dukungan menuju kemandirian. Ukuran tersebut berbeda dari jumlah kegiatan keagamaan atau besarnya pinjaman. Dengan demikian, kontribusi pada manajemen dakwah dapat diuji melalui tata kelola pelayanan sosial-keagamaan dan perubahan kapasitas jemaah, bukan sekadar label dakwah pada kegiatan pembiayaan (Aziz & Ali, 2005; Masyhur, 2022).

Secara keseluruhan, implikasi kebijakan yang dapat diambil ialah mengembangkan program dari mekanisme akses modal menjadi sistem yang memadukan pencatatan pinjaman, evaluasi kesejahteraan, pendampingan usaha, pengembalian dana, dan jejaring pemasaran. Komponen-komponen tersebut masih berupa rancangan penguatan tata kelola yang disarankan berdasarkan keterbatasan temuan, bukan kesimpulan bahwa seluruhnya telah berjalan efektif di Masjid Jogokariyan. Pemisahan antara fakta program, temuan persepsi responden, dan rekomendasi pengelolaan merupakan prasyarat akuntabilitas akademik maupun kelembagaan.

KESIMPULAN

Penelitian pada 31 penerima program pinjaman modal usaha Masjid Jogokariyan menunjukkan hubungan positif dan signifikan secara statistik antara persepsi kualitas akses dan pelaksanaan pembiayaan dengan kesejahteraan ekonomi yang dilaporkan responden ($\beta = 0{,}786$; $t = 7{,}265$; $p < 0{,}001$; $R^2 = 0{,}617$). Keluaran pengukuran sumber melaporkan AVE 0,620 dan 0,750; Cronbach's alpha 0,879 dan 0,842; serta composite reliability 0,906 dan 0,900. Sebanyak 28 responden (90,3%) menggunakan pinjaman untuk keperluan usaha. Temuan tersebut memberi bukti awal mengenai relevansi mutu pelaksanaan pembiayaan bagi evaluasi kesejahteraan penerima, tetapi tidak membuktikan bahwa program telah menghasilkan pemberdayaan atau peningkatan pendapatan yang bersifat kausal dan berkelanjutan. Kontribusi manajemen dakwah terletak pada potensi masjid sebagai perantara komunitas yang menghubungkan kebutuhan jemaah dengan dukungan kelembagaan eksternal dalam kerangka pelayanan sosial-keagamaan.

Batasan penelitian mencakup sampel nonprobabilitas dari satu masjid, ketiadaan pembanding dan pengukuran longitudinal, serta belum tersedianya

data aktual pengembalian pinjaman, pemanfaatan pasar rakyat oleh penerima, dan indikator kemandirian usaha. Hasil pengukuran juga memerlukan verifikasi satu perbedaan angka loading AM di antara tabel sumber dan perhitungan HTMT yang belum dilaporkan. Penelitian selanjutnya perlu menggunakan keluaran SmartPLS dan data indikator asli yang dapat diaudit, memperjelas prosedur pemilihan responden, serta menguji perkembangan usaha, pengembalian dana, pendampingan, dan peran mitra secara terpisah. Untuk pengelola masjid, rekomendasi utama ialah membangun evaluasi berkala yang membedakan kualitas pelayanan, manfaat ekonomi penerima, dan keberlanjutan kelembagaan.

DAFTAR PUSTAKA

Adams, A., Jumpah, E. T., & Caesar, L. D. (2021). The nexuses between technology adoption and socioeconomic changes among farmers in Ghana. *Technological Forecasting and Social Change*, *173*, 121133. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.121133

Alwi, M. M. (2016). Optimalisasi Fungsi masjid dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. *Al-Tatwir*, *2*(1).

Aziz, H. M., & Ali, R. S. (2005). Dakwah pemberdayaan masyarakat: paradigma aksi metodologi. *(No Title)*.

Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial Least Squares: Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0,-2/E.*

Heitzmann, K., & Matzinger, S. (2021). The (changing) consideration of social investment in the design of welfare benefits: The case of poverty relief in Austria. *Social Policy & Administration*, *55*(4), 573–588.

Hörner, D., & Wollni, M. (2021). Integrated soil fertility management and household welfare in Ethiopia. *Food Policy*, *100*, 102022. https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2020.102022

Iswanaji, C., Nafi'Hasbi, M. Z., Salekhah, F., & Amin, M. (2021). Implementasi Analitycal Networking Process (ANP) distribusi zakat terhadap pembangunan ekonomi masyarakat berkelanjutan (study kasus lembaga Baznas Kabupaten Jember Jawa Timur). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, *4*(1), 195–208.

Mahon, R. (2019). Broadening the social investment agenda: The OECD, the World Bank and inclusive growth. *Global Social Policy*, *19*(1–2), 121–138.

Masyhur, M. (2022). Peranan Baznas sebagai strategi dakwah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Lombok Barat. *Mudabbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, *3*(2), 353–363.

McHugh, N., Baker, R., & Donaldson, C. (2019). Microcredit for enterprise in the {UK} as an 'alternative' economic space. *Geoforum*, *100*, 80–88. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2019.02.004

Murtagh, B., & Boland, P. (2019). Community asset transfer and strategies of local accumulation. *Social & Cultural Geography*, *20*(1), 4–23.

Nurul, K. (2022). *Optimalisasi Potensi dan Fungsi Masjid Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid (Studi Masjid Al-Muflihin Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung)*. Uin Raden Intan Lampung.

Okyere, C. Y., & Ahene-Codjoe, A. A. (2022). Irrigated agriculture and welfare: Panel data evidence from Southern Ghana. *The European Journal of Development Research*, *34*(2), 583–610. https://doi.org/10.1057/s41287-021-00384-2

Panda, D. K., Bhattacharjee, K., Chatterjee, D., & Basu, S. (2023). Survival and sustenance strategy of primary agricultural cooperative credit societies in India: a fuzzy interpretive structural modelling approach. *International Journal of Social Economics*, *50*(6), 821–838.

Prasetyo, C., Firdaus, M. A., & Karman, A. (2023). Pengaruh Pinjaman Modal Usaha Dan Pendampingan Usaha Terhadap Pendapatan Umkm: Studi Kasus Baznas Microfinance Provinsi Papua. *SOSEBI: Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial Ekonomi Dan Bisnis Islam*, *3*(2), 151–165.

Rambe, A. (2004). *Alokasi pengeluaran rumahtangga dan tingkat kesejahteraan (Kasus di Kecamatan Medan Kota Sumatera Utara) [Tesis]*. Program Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor.

Ridha, I., Anjani, M., Misbahul, H., Firdaus, M. R., Ardel, M., Zarlianda, M. R., … Saputri, W. A. (2024). Pengaruh Kredit Perbankan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Hubungannya dengan Kesejahteraan Masyarakat. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *5*(7), 945–949.

Rohimat, A. M. (2020). Socio-entrepreneurship Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) dalam membentuk kesalehan sosial di tengah Covid-19. *Living Islam: Journal of Islamic Discourses*, *3*(1), 105–124.

Santika, T., Wilson, K. A., Meijaard, E., Budiharta, S., Law, E. E., Sabri, M., … Poh, T.-M. (2019). Changing landscapes, livelihoods and village welfare in the context of oil palm development. *Land Use Policy*, *87*, 104073. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.104073

Sethy, S., & Jana, C. (2021). Economic empowerment analysis of women in West Bengal using multivariate techniques. *Journal of Rural Development*, *40*(4), 548–562. https://doi.org/10.25175/jrd/2021/v40/i4/144217

Sumodiningrat, G. (2007). *Pemberdayaan sosial: kajian ringkas tentang pembangunan manusia Indonesia*. Penerbit Buku Kompas.

Wang, Y.-L., Lee, C.-H., & Ko, P.-S. (2020). Do loan guarantees alleviate credit rationing and improve economic welfare? *Sustainability*, *12*(9), 3922. https://doi.org/10.3390/su12093922

Wijaya, A. (2019). *Metode Penelitian Menggunakan SMART PLS 3*.

Yanti, P. P. (2022). *Pengaruh Kredit Modal Kerja Terhadap Pendapatan Umkm Di Kota Palopo (Studi Kasus Bank Bri Cabang Palopo)*. Universitas Muhammadiyah Palopo.

Yunus, M. (2007). *Banker to the poor: Micro-lending and the battle against world poverty*. PublicAffairs.